

Perjalanan Dinas DPRD Kesandung BPK

PONTIANAK-BPK menemukan sejumlah ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan, ketika melakukan pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar 2010. Salah satu

temuan itu adalah terkait dengan perjalanan dinas luar daerah di Sekretariat DPRD yang tidak sesuai ketentuan yakni sebesar Rp91,2 juta.

Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan

• ke halaman 15 kolom 5

Perjalanan Dinas DPRD Kesandung BPK

Sambung dari halaman 9

BPK, N Diva Mahaendra, menjelaskan, Pemprov Kalbar melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat DPRD dalam tahun anggaran 2010, menganggarkan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp12,5 miliar. Dana itu telah terealisasi sebesar Rp11,167 miliar atau 89,27 persen dari anggaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik, diketahui bahwa terdapat pembayaran perjalanan dinas luar daerah yang tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp91,2 juta. Soalnya, dari total belanja perjalanan dinas tersebut, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh orang yang sama pada waktu yang bersamaan dengan belanja perjalanan dinas luar daerah

lainnya sebesar Rp35,5 juta.

Selain itu, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sidang dalam TA 2010 sebesar Rp48,6 juta. Tak hanya itu, BPK juga mendapati adanya realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan reses TA 2010.

Sementara berdasarkan hasil konfirmasi BPK kepada Pemprov, diketahui bahwa Pemprov akan menarik kembali dana itu dari pihak-pihak terkait dan menyetorkannya ke kas daerah. Bahkan, ada pula pihak-pihak terkait yang sudah menyanggupi untuk mengembalikan dana tersebut ke kas daerah.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Kalbar, Bambang Soerachmat belum dapat berkomentar banyak mengenai temuan BPK tersebut. Soalnya, kata Bam-

bang, dirinya belum membaca buku laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Kalbar 2010.

Menurut Bambang, setelah LHP BPK diserahkan kepada pimpinan dewan dalam sidang paripurna istimewa beberapa hari lalu, langsung diperbanyak/fotocopy dan kemudian dibagikan ke masing-masing anggota DPRD. "Jadi untuk materi temuan itu saya belum bisa jawab karena belum baca," katanya.

Namun Bambang memastikan bahwa temuan-temuan BPK segera akan ditindaklanjuti oleh Pemprov, baik eksekutif maupun legislatif. Bahkan, eksekutif dan legislatif akan membentuk panitia kerja atau panitia khusus. "Di tingkat eksekutif, nanti upaya tindak lanjutnya akan diketuai wagub sedangkan di DPRD akan dibentuk pansus," jelas Bambang. (ml)

RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH SEKRETARIAT DPRD 2010

	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)
1. Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	2,089 M	1,85 M
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	26,4 juta	-
3. Kunker pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah	9,8 M	8,9 M
4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD	73,6 juta	29,3 juta
5. Penyusunan Perda dan Nonperda	78,8 juta	64 juta
6. Dukungan Keprotokolan	285,6 juta	285,5 juta
7. Seleksi Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi	33 juta	17 juta
8. Pelantikan PAW	19,2 juta	-
9. Pembuatan Naskah Kajian Akademik Raperda Inisiatif	98,4 juta	-
Total	12,509 M	11,167 M

Sumber: BPK RI